PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**
LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WAHYUNINGSIH**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **795262**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/6 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/6 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/10 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/10 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 6.78 m2/10 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 364.500.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA A1FO2N37M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA E1FO2N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	773.688.170
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	80.000.000
	Sub Total	Rp.	6.285.688.170
III.	HUTANG	Rp.	838.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.447.688.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.